



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, April 2022

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BPKD KOTA PEMATANGSIANTAR

Majalipa awalia¹, Juliana Nasution²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[*mazalifaawalia@gmail.com*](mailto:mazalifaawalia@gmail.com)¹, [*juliananasution@uinsu.ac.id*](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id)²

ABSTRACT

The internal control system is regulated by government regulation number 60 of 2008. With the existence of an internal control system on the quality of financial reports, it will produce quality financial reports, so that it will minimize errors in the process of recording financial reports. This study seeks to identify and assess the impact of internal control on the quality of financial reports at BPKD Pematang Siantar. This institution has built an efficient and effective financial reporting internal control system. The recording system at the Pematangsiantar City BPKD has implemented government regulation no. 71 in 2010.

Keywords: *internal control system, quality of financial reports, regional finance*

ABSTRAK

Sistem Pengendalian internal diatur oleh peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. Dengan adanya sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan laporan keuangan. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menilai dampak pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di BPKD kota PematangSiantar. Lembaga ini telah membangun sistem pengendalian internal pelaporan keuangan yang efisien dan efektif. Sistem pencatatan pada BPKD Kota Pematangsiantar telah merapkan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010.

Kata Kunci: *sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, keuangan daerah*

PENDAHULUAN

Pengendalian internal adalah suatu proses terpadu dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menanamkan keyakinan yang cukup terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya melalui operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai PP No. 60 Tahun 2008. Suatu sistem yang menyeluruh diterapkan di seluruh pemerintah pusat dan kota, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah daerah juga memerlukan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan organisasi mereka. Pengendalian internal digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengatur pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengkoordinasikan desain, pelaksanaan, dan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah dengan organisasi lain. BPKD dirancang sedemikian rupa sehingga prosedur operasi standar untuk pengelolaan pendapatan dapat membantu dalam meningkatkan tanggung jawab dan kinerja keuangan daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PP RI Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan adalah dokumen yang mencakup informasi keuangan organisasi.

Laporan keuangan pemerintah harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang kualitas kualitatif yang relevan, andal, serupa, dan dapat diperbandingkan. Dipahami. Laporan Pelaksanaan Anggaran diwajibkan berdasarkan PP 71 Tahun 2010. Pemutakhiran Neraca Anggaran (Laporan Perubahan SAL). catatan keuangan Rapport de l' (LO). Arus Kas (LAK). Perubahan Ekuitas Catatan Laporan Keuangan CaLK (RI 2010). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan hukum untuk meningkatkan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Pengendalian internal

Pengendalian internal didefinisikan mendorong seseorang atau karyawan dari area tertentu atau perusahaan secara keseluruhan untuk berfungsi sesuai dengan tujuan organisasi. Atas nama organisasi, Mulyadi (2010:163) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri dari "struktur, prosedur, dan bentuk organisasi". Menjamin kebenaran data akuntansi, memfasilitasi penggunaan perangkat lunak akuntansi, dan mempromosikan penerapan kebijakan manajemen".

Indra Bastian (2007, p.450) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal "memverifikasi integritas dan ketergantungan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan sesuai dengan kebijakan kepemimpinan." Sistem pengendalian internal ditentukan oleh tujuan, bukan komponennya. Dengan demikian, konsep sistem pengendalian internal di atas berlaku untuk bisnis yang memproses informasi secara manual, menggunakan peralatan akuntansi, atau melalui komputer.

Laporan keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:2), laporan keuangan perusahaan memuat informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang mengatur tentang pedoman pengelolaan laporan keuangan daerah, secara umum menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan kekayaan.

Tujuan laporan keuangan

Menurut PSAK No.1 paragraf 7 (Revisi 2009), tujuan laporan keuangan adalah “untuk menyediakan informasi tentang posisi laporan keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. keputusan.” Laporan keuangan harus "akurat, tepat waktu, dan relevan".

Karakteristik laporan keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, aspek kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut: Agar informasi akuntansi dapat mencapai tujuan, harus memiliki karakteristik kualitatif. “Fitur kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi.” Untuk mencapai kualitas yang sesuai dalam laporan keuangan pemerintah memerlukan empat kondisi normatif, yaitu: relevan, dapat diandalkan, komparatif, dan dapat dipahami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan analisis kualitatif dengan teknik deskriptif, yaitu metode untuk mengelola, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari hasil data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan metode naturalistik untuk menggali dan menemukan makna atau pemahaman peristiwa dalam situasi kontekstual tertentu, menurut Moleong (2005) Lokasi Penelitian ini dilakukan pada BPKD Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar , yang terletak di Jalan Merdeka No.8 Kota Pematangsiantar.

Bahan dalam penelitian ini telah dikumpulkan dari sumber primer saja. Data primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari sumber selama wawancara dan yang akan membutuhkan pemrosesan ekstra oleh peneliti. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah semua metode pengumpulan data primer dari orang-orang. Data teoritis yang digunakan dalam pendekatan pengumpulan data berasal dari berbagai sumber, antara lain buku, media penulisan ilmiah, dan literatur. Penelitian lapangan dilakukan dengan kombinasi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang meliputi observasi langsung dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pengendalian intern adalah sistem pengendalian yang dilaksanakan sepenuhnya di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah harus memperkuat sistem pengendalian internal (SPI). Kualitas sistem itu akan mempengaruhi opini BPK. Pemerintah juga harus mengkaji ulang kualitas sistem pengendalian internalnya. Pengendalian internal diatur oleh GOV 60/2008. (Peraturan Sistem Pengendalian Internal). Sistem pengendalian internal akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Pengawasan internal dan eksternal tidak dapat dipisahkan.

Elemen sistem pengendalian internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, berikut ini adalah komponen-komponen sistem pengendalian internal:

1. Pengelolaan lingkungan dan pengendalian mengharuskan pimpinan pemerintahan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang mendorong perilaku yang baik dan memfasilitasi penerapan sistem pengendalian internal.
2. untuk mencapai tujuan entitas, penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi dan menilai risiko yang relevan dalam konteks mencapai tujuan tersebut, serta memilih tanggapan yang sesuai untuk risiko yang berasal dari perubahan.

3. Kegiatan yang berada di bawah kendali Penanggung jawab instansi pemerintah diharapkan melakukan operasi pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan.
4. Adalah mungkin untuk mengidentifikasi informasi dan komunikasi di dalam suatu organisasi, merekamnya, dan menyebarkannya dalam bentuk yang tepat dan pada waktu yang tepat dengan cara yang efektif. Dengan berbagi informasi dengan benar, pemahaman bersama akan terbentuk di berbagai tingkat manajemen organisasi.
5. Pemantauan pengendalian internal dilakukan. Pemantauan akan digunakan untuk memeriksa kualitas kinerja secara keseluruhan secara berkala dan untuk memastikan bahwa saran dari laporan audit dan evaluasi lainnya dilaksanakan sesegera mungkin.

Prosedur pengendalian internal

Untuk memenuhi tujuan Pengendalian Internal, menurut Bambang Hartadi (dalam Tenun Sembiring, 2009), harus ada enam proses, yaitu sebagai berikut.

1. Pemisahan Fungsi merupakan konsep penting dalam pengembangan perangkat lunak. Menurut sistem kontrol, ada pemisahan fungsi, dan tugas atau pelaksanaan transaksi akan dilakukan pemeriksaan silang otomatis sebelum diselesaikan.
2. Proses Persetujuan Langkah ini memverifikasi bahwa orang yang berwenang telah mengotorisasi transaksi. Tergantung pada transaksi, otorisasi dapat bersifat umum atau khusus. Umumnya, otorisasi umum mengacu pada kondisi umum seperti daftar harga standar dan kredit penjualan. Otorisasi khusus menargetkan transaksi tertentu seperti penjualan, penggajian, dan pembelian. Suatu transaksi dibuktikan dengan bukti otorisasi khusus.
3. Prosedur untuk Dokumentasi Pembangunan sistem pengendalian akuntansi yang efisien tidak mungkin dilakukan tanpa adanya dokumen yang tepat. Dokumentasi berfungsi sebagai dasar untuk pendelegasian tugas untuk pelaksanaan dan pencatatan transaksi, antara lain. Dokumentasi dapat berupa faktur, voucher, tanda tangan, inisial, dan stempel persetujuan, di antara bentuk tanda pengenalan lainnya. Pemberian nomor tercetak untuk setiap jenis dokumen dimaksudkan untuk membantu pembentukan dan pemeliharaan pengendalian transaksi.
4. Catatan dan Prosedur Akuntansi Proses dan Data Akuntansi Pendekatan ini menekankan departemen akuntansi karena transaksi dicatat di sana. Kedua, data akuntansi dapat tersampaikan dengan cepat kepada pihak yang membutuhkan. Kontrol ini memastikan bahwa catatan akuntansi yang akurat dapat dihasilkan dengan cepat.
5. Aset dan dokumen keuangan berada di bawah kendali fisik. Dalam konteks pengendalian fisik, (1) alat dan cara pengamanan untuk memulihkan aset, catatan akuntansi, dan formulir cetak yang tidak digunakan, dan (2) penggunaan peralatan mekanik dan elektronik dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi dibahas.
6. Pemeriksaan Internal yang independen dari pemeriksaan eksternal Teknik ini dimaksudkan untuk menilai apakah komponen lain dari sistem berfungsi dengan baik atau tidak. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar prosedur ini efektif: (1) pengawasan harus dilakukan oleh orang yang bebas dan bertanggung jawab atas data; (2) pengawasan harus dilakukan pada waktu atau waktu yang wajar dan mendadak atau pemberitahuan sebelumnya; dan (3) penyimpanan harus diselesaikan. manajemen telah diberitahu, dan siapa yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan perbaikan.

Prinsip-prinsip pengendalian internal

Munawir (Holmes Arthur: 79) mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai konsep utama pengendalian internal atas pelaporan keuangan:

1. Hal ini diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab untuk setiap pelaksanaan tugas.
2. Tugas pencatatan dan operasi harus tetap berbeda.
3. Pengecekan akurasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa operasi peminjaman dan

pembukuan sudah benar.

4. Karyawan tidak diperkenankan menyelesaikan transaksi secara keseluruhan.
5. Karyawan harus dipilih melalui penggunaan bagian yang efektif.
6. Karyawan harus diwajibkan oleh ketentuan perjanjian.
7. Sistem rotasi pekerjaan harus ada.
8. Instruksi tertulis tentang cara melakukan operasi harus diminta.
9. Buku besar pembantu digunakan.
10. Hal ini diperlukan untuk menggunakan alat-alat mekanik dan listrik.

Informasi yang disajikan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa unsur-unsur dan prosedur pengendalian internal yang terkandung di dalamnya telah dilaksanakan atau dilaksanakan oleh BPKD Daerah, sebagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sistem pengendalian internal BPKD Daerah Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di kantor BPKD Daerah Kota Pematangsiantar menjamin kualitas laporan keuangan yang baik dengan cara memantau dan mencatatnya secara cermat. Pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah meliputi: Laporan Realisasi Anggaran Perubahan Saldo Anggaran: Laporan Situasi (Laporan Perubahan SAL). Neraca menunjukkan berapa banyak uang yang Anda miliki. OSR (LO). Laporan arus kas menunjukkan berapa banyak uang yang masuk dan keluar (LAK). Laporan Ekuitas melacak perubahan ekuitas atas catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Atas dasar temuan penelitian yang telah dilakukan, maka dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan yang terjadi pada BPKD Kota Pematangsiantar melakukan kegiatan pengendalian internal seperti: pemantauan terhadap laporan keuangan untuk pengendalian lingkungan; komunikasi; informasi; kegiatan pengendalian; dan pemisahan tugas. Organisasi pengelolaan keuangan daerah tunduk pada pengawasan pengendalian internal, yang dilakukan di bidang pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Melakukan pengawasan agar auditor dapat mengevaluasi pengendalian yang tepat guna mencegah/mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan selama audit. Kegiatan pengendalian utama BPKD Daerah Kota Pematangsiantar adalah mewajibkan seluruh pegawai mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas tinggi. Adanya sistem pengendalian mutu internal atas laporan keuangan memungkinkan dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat pencatatan laporan keuangan.

KESIMPULAN

Temuan-temuan berikut dicapai oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang telah dijelaskan dan dianalisis:

1. Sistem Pengendalian Internal pelaporan keuangan BPKD Daerah Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku. Sistem pengendalian internal kualitas laporan keuangan diterapkan di kantor BPKD Daerah Kota Pematangsiantar dengan melakukan pemantauan dan pendokumentasian laporan keuangan.
2. Mulai dari transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, saldo kelebihan anggaran, laporan operasional, neraca, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan CaLK, sistem pencatatan di BPKD Kota Pematangsiantar telah menerapkan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010.
3. Dengan adanya sistem pengendalian internal untuk memastikan kualitas laporan keuangan, maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas, meminimalkan timbulnya kesalahan selama proses pencatatan laporan keuangan.

DAFTAR LITERATUR

- Lumbanraja, T. (2019). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar*. 12(2), 80–95.
- Kasus, S., Badan, P., Keuangan, P., Aset, D., Bengkalis, K., & Rahmany, S. (2020). *ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL*. 4(1), 110–123.
- Triono, B. R. M. S., & Dewi, S. N. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 21(1), 213–220.
- Tinggi, S., Ekonomi, I., & Mulya, T. (2020). *Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan*. 11(2), 170–178.
- Mauli, A., Rosmiati, M., & Kunci, K. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah Periode 2015-2019*. 26–27.
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang*. 09(05), 43–51.